

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 003/HK.01.01/K.SN-19/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. Bahwa undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak warga Negara dan keterbukaan Informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaualatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik maka diperlukan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang transparan, efektif, efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. 5149);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Tahun 2018 Nomor 141);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
8. 2019 Nomor 189);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
10. Tahun 2021 Nomor 411);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- 1) Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - 2) Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - 3) Atasan PPID :
 - a. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas :

- a. Menyusun Standar Prosedur Operasional yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi Publik kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon dan persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja

Pada tanggal : 24 Februari 2026

K E T U A



ELIS BUA' MANGESA'

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Masing-masing bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 003/HK.01.01/K.SN-19/02/2026
Tanggal : 24 Februari 2026

SUSUNAN
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Elis Bua’ Mengesa’, S.E.	Ketua Bawaslu Tana Toraja	Pembina
2.	Theofilus Lias Limongan, S.Th	Anggota Bawaslu Tana Toraja	Tim Pertimbangan
3.	Widiyatmo, S.E	Anggota Bawaslu Tana Toraja	Tim Pertimbangan
4.	Delbianus Patandean, S.Pd.,M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Tana Toraja	Atasan PPID
5.	Muh. Aditya Ibrahim, S.STP.,M.Si	Kasubag Pengawas Pemilu dan Humas	PPID
6.	Dorce Limbong Bandhaso’, S.E.,M.S.i	Kasubag PPPS dan Hukum	Petugas Pelayanan PPID
7.	Marno, S.E	Staf Bawaslu Tana Toraja	Petugas Pelayanan PPID
8.	Muh. Basyiruddin	Staf Bawaslu Tana Toraja	Petugas Pelayanan PPID
9.	Syahril Saguni, S.E	Staf Bawaslu Tana Toraja	Petugas Pelayanan PPID
10.	Dewi Hariati Ramlan, S.I.Pust	Staf Bawaslu Tana Toraja	Petugas Pelayanan PPID

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada tanggal : 24 Februari 2026
K E T U A



ELIS BUA’ MANGESA’